

# MEMAHAMI MIGRASI PEKERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI<sup>1</sup>

*Sukamdi<sup>2</sup>*

## Abstract

*There are evidence of growing Indonesian labour migration flows overseas. This involves at least two other important issues. The first one is the increase of undocumented (illegal) international migration from Indonesia, mostly to neighboring countries. Second, feminization of labour migration is also expected to grow to responses consequences on both macro and micro level. Many of them have been well addressed in research, but still left some important issues, such as trafficking and children left behind. Several researches have been conducted in there two subjects, but still limited. In fact they are very important in developing a more sound policies to alleviate the negative impact of international labour migration.*

*Keywords: migration overseas, feminization, trafficking*

## Pendahuluan

Terdapat kritik yang cukup tajam, terutama terhadap cara memahami fenomena migrasi internasional. Menurut Abdullah (2002) dan Faturochman (2002), hal tersebut disebabkan oleh landasan teoretis dan konseptual yang digunakan cenderung menyederhanakan fakta. Abdullah (2002) mengatakan migrasi tidak lagi harus dipahami sebatas konsep daya dorong dan daya tarik (*push-pull theory*) atau menurut Faturochman (2002), pada *event* yang teramat dan terukur. Migrasi internasional merupakan fenomena yang sangat kompleks dan melibatkan banyak isu. Isu tentang jaminan keamanan misalnya, status hukum, status kewarganegaraan, dan diskriminasi sosial perlu memperoleh perhatian lebih.

Migrasi harus dipandang sebagai perilaku, dan lebih menekankan pada proses, bukan hanya respons terhadap suatu kondisi tertentu. Hal ini merujuk pada kenyataan persoalan migrasi jauh lebih kompleks daripada sekadar respons penduduk terhadap “ketidaknyamanan”. Bukti mengenai hal tersebut sangat jelas, misalnya meskipun secara objektif suatu daerah “tidak nyaman” secara sosial, ekonomi maupun politik, penduduk menikmati dan tidak merasakan “ketidaknyamanan” tersebut sehingga tidak bermigrasi. Tentu saja hal ini bukan hanya sekadar perhitungan untung rugi, tetapi juga mencakup konteks sosial budaya, bahkan politik yang melatarbelakanginya.

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan revisi dari makalah yang disajikan pada Seminar dan Launching State of World Population Tahun 2006, Kamis 7 September 2006 di Hotel Novotel Jakarta.

<sup>2</sup> Staf pengajar Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada dan staf peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Akibat langsung dari pemanfaatan teori-teori migrasi klasik untuk memahami migrasi internasional telah berakibat terhadap cara pandang, bahkan kebijakan pemerintah terhadap migran. Istilah ekspor tenaga kerja, pahlawan devisa, dan lain sebagainya memperlihatkan fenomena migrasi internasional secara sempit dipandang sebagai pengiriman “barang” dan menghasilkan uang sebagaimana ekspor impor barang. Bahkan memahami motif bermigrasi pun dari sisi ekonomi tidak harus dilakukan dengan menggunakan konsep *cash income* secara sempit (Marrie Wattie, 2002). Dengan menempatkan motif ekonomi sebagai fokus, ada kecenderungan untuk meremehkan migran sebagai individu, sebagai manusia, dan hubungan sosial psikologis dengan individu lain serta lingkungan sosialnya.

Tulisan ini tentu saja tidak akan membahas aspek teoretis migrasi internasional, tetapi lebih kepada pemahaman terhadap fenomena migrasi internasional berdasarkan teori yang telah ada. Hal ini dimaksudkan agar migran tidak lagi diletakkan sebagai objek, tetapi mereka sebagai individu maupun kelompok yang berperan sebagai subjek. Migran bukan hanya sebagai “angka” atau statistik yang maknanya dapat bermacam-macam sesuai dengan keinginan, tetapi diposisikan sebagai *human being* yang harus diperlakukan secara berbeda dari “barang”.

### **Tren Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri**

Meskipun migran bukan sekadar angka, untuk memahami kondisi makro secara nasional diperlukan pembahasan mengenai

aspek kuantitatif migran. Hal ini akan menuntun kita untuk membicarakan migran secara objektif dengan melakukan interpretasi terhadap kecenderungan dan pola yang muncul.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri Selama Repelita I – Repelita V**

Repelita	Periode	Jumlah Migran
Repelita I	1969 – 1974	5.624
Repelita II	1974 – 1979	17.042
Repelita III	1979 – 1984	96.410
Repelita IV	1984 – 1989	292.262
Repelita V	1989 – 1994	652.272

Sumber: Nasution, 2000:195, Tabel 3.

Arus migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri memiliki sejarah panjang. Berdasarkan data yang tersedia, sejak Repelita I terlihat secara konsisten jumlah migran internasional mengalami peningkatan. Akan tetapi, peningkatan jumlah yang drastis terjadi pada periode 1979-1984 (Repelita II) ke 1984-1989 (Repelita III). Pada periode ini terjadi peningkatan lima kali lipat lebih jumlah migran internasional. Pada periode berikutnya, meskipun mengalami peningkatan yang lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya, secara absolut jumlahnya menjadi sangat besar (Tabel 1). Pada tahun-tahun berikutnya, peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih berlangsung terus sehingga pada periode 1989-1994 mencapai di atas 650 ribu orang. Menurut Hugo (1995), pemerintah memiliki target untuk mengirim tenaga kerja ke luar

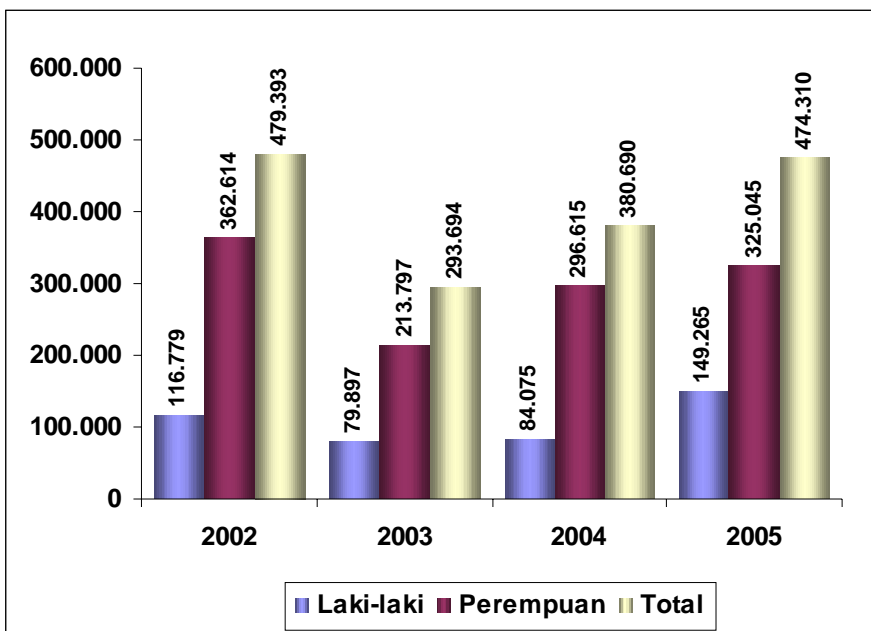
negeri sebesar 1,5 juta selama periode 1994-1999.

Pada periode berikutnya, yaitu 1995-1997, jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri meningkat empat kali lipat lebih. Sementara itu, jumlah penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pada tahun 1997 mencapai puncaknya, yaitu di atas setengah juta orang. Tampaknya hal ini berkaitan dengan perekonomian Indonesia pada waktu itu yang tengah dilanda krisis ekonomi. Pada tahun 1999 jumlah tersebut cenderung menurun mencapai 427,6 ribu orang dan kemudian meningkat sedikit menjadi 435,1 ribu orang pada tahun 2000 (Sukamdi, dkk., 2004:146). Apabila diambil rata-rata per tahun terdapat 400-500 ribu tenaga kerja bekerja di luar negeri, maka target pemerintah tersebut di atas dapat dicapai.

Data pada empat tahun terakhir, yaitu periode 2002-2005, menunjukkan jumlah penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri berfluktuasi (Grafik 1). Pada periode 2002-2003 terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 479.393 menjadi 293.634 orang. Akan tetapi, pada periode 2003-2005 jumlah tersebut meningkat hampir mencapai kondisi pada tahun 2002. Perlu dicatat meskipun pada tahun ini jumlah TKI ke luar negeri cukup besar, angkanya masih belum dapat melampaui angka tahun 1997.

Selama dua tahun terakhir, 2006-2007, jumlah penempatan TKI meningkat sangat drastis dibandingkan dengan tahun 2005. Data dari Depnakertrans ([www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker/tki/](http://www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker/tki/)) menunjukkan pada tahun 2006 tercatat 680.000 TKI bekerja di luar negeri. Dari jumlah tersebut 326.822 bekerja

**Grafik 1**  
Perkembangan Jumlah TKI di Luar Negeri  
menurut Jenis Kelamin Tahun 2002-2005



**Tabel 2**  
**Lima Daerah Tujuan Utama TKI Periode 1995-2002**

Rank	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1	A. Saudi	Malaysia	A. Saudi	A. Saudi	Malaysia	Malaysia	Malaysia	A. Saudi
2	Malaysia	A. Saudi	Malaysia	Malaysia	A. Saudi	A. Saudi	A. Saudi	Malaysia
3	Singapore	Singapore	Singapore	Singapore	Singapore	Taiwan	Taiwan	Taiwan
4	Korea	Korea	Taiwan	Hongkong	Taiwan	Singapore	Singapore	Hongkong
5	Taiwan	Taiwan	UEA	Taiwan	UEA	Hongkong	Hongkong	Singapore

Sumber: Disarikan berdasarkan data ILO<sup>3</sup> yang dikutip dari <http://www.abetech.org/ilm/english/ilmstat/stat01.asp>.

di kawasan Asia Pasifik dan 353.189 bekerja di kawasan Timur Tengah. Pada tahun 2007 jumlah tersebut sedikit menurun menjadi 593.024, tetapi masih lebih besar dibandingkan dengan tahun 2005. Terlihat selama periode 2005-2007 ada kecenderungan peningkatan jumlah TKI di luar negeri.

Semua data tersebut di atas membuktikan secara umum jumlah migran internasional tenaga kerja dari Indonesia cenderung meningkat. Diperkirakan hal ini akan berlanjut di masa-masa mendatang. Di samping jumlah yang cenderung meningkat, terdapat suatu perubahan pola yang menarik jika dilihat dari daerah tujuan. Menurut Nafyard (lihat Tjiptoherijanto, 2000), daerah tujuan migran Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga berdasarkan periodisasinya. *Pertama*, selama periode 1969-1979 kurang lebih 50 persen migran Indonesia pergi ke Eropa, khususnya Belanda. *Kedua*, antara tahun 1979-1989 sebagian besar migran dari Indonesia memilih

Negara Teluk, terutama Arab Saudi sebagai daerah tujuannya. *Ketiga*, periode tahun 1990 sampai dengan pertengahan tahun 1990-an Malaysia merupakan daerah tujuan favorit tenaga kerja Indonesia.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh ILO, terdapat kecenderungan daerah tujuan yang berubah-ubah selama periode 1995-2002 (Tabel 2). Meskipun demikian, dari hal itu dapat diidentifikasi pola yang menarik. Pertama, selama periode 1995-2002 terdapat dua negara favorit tujuan migran dari Indonesia, yaitu Malaysia dan Arab Saudi. Kedua negara ini secara bergantian menempati peringkat pertama dan kedua selama periode tersebut. Di samping itu, terdapat pergeseran daerah tujuan favorit ketiga. Selama periode 1995-1999, Singapura menjadi daerah tujuan favorit ketiga, tetapi pada periode 2000-2001 negara ini turun peringkat menjadi keempat dan pada tahun 2002 turun menjadi urutan kelima, atau di bawah Hongkong. Bahkan jika dilihat dari

<sup>3</sup> Data jumlah migran tenaga kerja Indonesia yang terdapat di website ILO berbeda dengan data yang di keluarkan oleh Kantor Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tetapi secara umum pola yang ditemui tidak memiliki perbedaan yang berarti.

data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ([www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker/tki](http://www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker/tki)), jumlah TKI di Singapura pada tahun tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Kuwait.

Pada tahun 2003 sampai dengan 2005, Arab Saudi masih menempati urutan pertama sebagai daerah tujuan favorit disusul Malaysia pada urutan kedua. Pada periode tersebut terdapat perubahan urutan ketiga. Kuwait berada pada urutan ketiga pada tahun 2003-2004, tetapi kemudian menurun menjadi urutan kelima karena digeser oleh Taiwan (urutan ketiga) dan Singapura (urutan keempat). Pada tahun 2006, Saudi Arabia tetap sebagai daerah tujuan sebagian besar TKI dari Indonesia (45,2 persen) disusul oleh Malaysia (39,7 persen), Taiwan (4,1 persen), dan UEA/Abu Dhabi (2,3 persen). Pada tahun 2007, untuk kawasan Asia Pasifik, Malaysia masih menjadi tujuan utama para pekerja disusul oleh Taiwan dan Hongkong.<sup>4</sup>

Kembalinya Arab Saudi sebagai daerah tujuan utama migran dari Indonesia menarik untuk diamati. Pada awalnya, sebelum krisis minyak pada akhir tahun 1970-an, jumlah migran dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia, ke Timur Tengah berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor konstruksi. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang pergi ke wilayah tersebut pada umumnya adalah laki-laki. Akan tetapi, jika dilihat data terakhir, kenaikan jumlah tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, lebih banyak adalah perempuan.

Menurut Asis (2003), hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan *domestic worker*, khususnya pembantu rumah tangga. Hal yang sama terjadi di negara-negara Asia Timur yang kemudian menyebabkan banyak tenaga kerja dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang pergi ke negara di kawasan tersebut. Apabila argumentasi ini benar, migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi, merupakan respons terhadap kebutuhan pekerja kasar (*unskilled worker*). Dengan demikian, usaha untuk meningkatkan pengiriman tenaga kerja ke pekerjaan terampil (*skilled worker*) tampaknya masih belum terwujud.

Sementara itu, banyak penulis yang memberikan argumentasi alasan utama mengapa TKI memilih Malaysia sebagai daerah tujuan utama adalah berkaitan dengan jarak yang relatif dekat dan didukung oleh aspek kultural yang memiliki banyak kemiripan. Di samping itu, menurut Quibria (Tjiptoherijanto, 2000), kondisi ekonomi di daerah tujuan juga ikut memengaruhi pergeseran daerah tujuan migran. Kinerja ekonomi yang semakin membaik di kawasan Asia Timur pada akhirnya ikut memengaruhi pilihan migran untuk bekerja. Akan tetapi, khusus untuk Malaysia, tampaknya kebijakan pemerintah setempat (Malaysia) yang memulangkan tenaga kerja ilegal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan migran untuk memilih daerah tujuan (Sukamdi, dkk., 2004).

Fakta yang menarik lainnya adalah Singapura tidak lagi menjadi negara pilihan.

---

<sup>4</sup> Data TKI menurut daerah tujuan untuk Kawasan Timur Tengah tidak tersedia.

Data tahun-tahun terakhir menunjukkan jumlah TKI ke negara ini lebih sedikit dibandingkan dengan TKI yang bekerja di Taiwan. Hal ini menunjukkan faktor jarak tidak lagi menjadi alasan utama bagi migran internasional. Hubungan jarak dengan migrasi sebagaimana dalam teori migrasi klasik, bahwa migran cenderung memilih daerah terdekat, setidaknya dibantah oleh kenyataan ini.

Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah walaupun secara kuantitatif tidak ada data yang akurat, TKI tidak terdokumentasi<sup>5</sup> merupakan bagian penting dalam fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Beberapa kajian memperlihatkan jumlah migran tidak terdokumentasi, khususnya ke Malaysia cukup besar (Mantra, dkk., 1999; Dwiyanto, 2001; Kassim, 1997; Hugo, 1992). Informasi yang berhasil dikumpulkan menunjukkan hal tersebut; misalnya Kassim (1997) dan Hugo (1992) memperkirakan terdapat 700,000 migran tidak terdokumentasi; *Kompas* (Keban, 2000) memperkirakan proporsi migran tidak terdokumentasi di Malaysia mencapai 58,36 persen. Bahkan Vermonte (2002) memberikan angka yang cukup tinggi, yaitu dua pertiga migran Indonesia di Malaysia adalah termasuk migran tidak terdokumentasi. Angka ini diperkirakan berkurang segera setelah Pemerintah Malaysia menerapkan Undang-Undang Imigrasi yang baru.<sup>6</sup>

Migran tidak terdokumentasi ke Malaysia berlangsung melalui dua jalur utama, yaitu dari Jawa Timur–Sumatra utara dan Selatan ke Peninsular Malaysia serta dari Flores-Sulawesi Selatan ke Sabah ([www.unesco.org/most/amprnwp8.htm](http://www.unesco.org/most/amprnwp8.htm)). Dalam prosesnya, pengiriman TKI tidak terdokumentasi melibatkan banyak pihak, termasuk di antaranya sindikat calo, perekrut tenaga kerja, dan taikong. Keterlibatan mereka membawa beberapa konsekuensi, misalnya biaya yang dibayarkan oleh tenaga kerja menjadi lebih mahal dan perlindungan terhadap TKI menjadi sangat minimal. Banyak kasus menunjukkan sebagian besar permasalahan yang dihadapi oleh TKI adalah karena mereka berangkat melalui cara ini.

Besarnya jumlah migran tidak terdokumentasi merupakan salah satu indikator kegagalan pemerintah menangani migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri secara baik. Kenyataan migran tidak terdokumentasi justru membayar lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang melalui jalur resmi (Mantra, dkk., 1999) menunjukkan persoalan biaya bukan lagi pertimbangan penting. Barangkali tingkat kompleksitas prosedur pemberangkatan secara resmi adalah penyebab migran enggan untuk melakukannya. Ironisnya, keberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri menggunakan jalur tidak resmi (*undocumented*) justru menguntungkan para

---

<sup>5</sup> Istilah tidak terdokumentasi sengaja digunakan oleh penulis dibandingkan dengan istilah ilegal agar konsisten dengan hasil ICPD 1994 di Kairo yang menggunakan konsep *undocumented* untuk migran yang masuk ke suatu negara dengan tidak mengikuti prosedur yang ada.

<sup>6</sup> Undang-undang tersebut mengharuskan semua migran tidak terdokumentasi sudah meninggalkan negara tersebut sebelum 1 Agustus 2002. Beberapa hukuman diberlakukan bagi mereka yang melanggar, misalnya denda sebesar RM 10.000, hukuman penjara lima tahun, dan hukuman cambuk enam kali.

calo dibandingkan dengan migrannya sendiri (Ananta, 2000).

Hasil menarik ditunjukkan oleh Tamtari (1999) berdasarkan penelitian di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Penelitian tersebut menunjukkan justru jumlah *remittances* yang dikirim oleh migran tidak terdokumentasi lebih tinggi dibandingkan dengan migran yang menggunakan jalur resmi. Apabila kondisi ini menggambarkan perbedaan kondisi ekonomi migran di daerah tujuan, tidak mengejutkan apabila banyak tenaga kerja Indonesia yang memilih jalur tidak resmi dibandingkan dengan yang resmi walaupun mereka harus membayar lebih tinggi.

Fenomena lain yang menarik untuk dibahas di luar peningkatan jumlah serta tingginya migran tidak terdokumentasi adalah terjadinya feminisasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (Sukamdi, dkk., 2004; Hugo, 2004; Setiadi, 2004, Wee and Sim, 2004; Asis, 2003). Feminisasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri telah terlihat sejak awal tahun 1980-an. Hal itu dapat diamati dari data selama periode 1983-2005<sup>7</sup> yang memperlihatkan sejak tahun 1984-1985, jumlah migran perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Data pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan ada kecenderungan perbedaan jumlah antara migran perempuan dan laki-laki yang semakin besar. Menurut Hugo (2004), hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi sudah menjadi fenomena umum di Asia Tenggara selama lima puluh tahun terakhir. Menurut Wee and Sim

(2004), feminisasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri lebih nyata dibandingkan dengan Filipina yang dikenal sebagai pengirim pekerja perempuan tertinggi di dunia.

Menurut Asis (2003), peningkatan migrasi tenaga kerja perempuan berkaitan dengan tingginya *demand* pembantu rumah tangga dan pengasuh anak di negara tujuan. Sementara itu, migrasi tenaga kerja laki-laki lebih berkaitan dengan respons terhadap kebutuhan tenaga kerja dalam proses industrialisasi.

Lebih lanjut Asis (2003) mengatakan feminisasi tenaga kerja ke luar negeri memunculkan paradoks. Di satu pihak kenyataan tenaga kerja perempuan yang ke luar negeri sebagian besar pergi sendirian<sup>8</sup> tanpa didampingi oleh suami atau anggota keluarga yang lain merupakan gambaran kebebasan dan kemampuan memilih yang lebih besar bagi perempuan. Akan tetapi, konsentrasi tenaga kerja perempuan pada pekerjaan yang penuh risiko memunculkan pertanyaan apakah migrasi benar-benar memberikan dampak positif bagi kehidupan perempuan?

Ada beberapa isu penting lainnya yang terkait dengan feminisasi tenaga kerja ke luar negeri. Salah satu di antaranya adalah persoalan perlindungan terhadap tenaga kerja. Banyak kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia terjadi pada perempuan (Sukamdi, 2004). Terlebih lagi jika masalah tersebut dikaitkan dengan status mereka yang *undocumented*, maka masalah yang menimpa

<sup>7</sup> Data tahun 2006 dan 2007 yang tersedia tidak memisahkan TKI berdasarkan jenis kelamin.

<sup>8</sup> Wee dan Sim (2004) mengatakan tidak sepenuhnya benar pekerja perempuan pergi ke luar negeri sebagai bentuk independensi karena faktanya, keseluruhan proses migrasi difasilitasi oleh orang lain, apakah individu, perusahaan atau organisasi.

tenaga kerja perempuan menjadi lebih serius lagi. Sudah bukan rahasia umum bahwa tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, khususnya perempuan, menjadi objek pemerasan sejak sebelum berangkat sampai kembali ke tanah air (Wee dan Sim, 2004). Hal ini menimpa, baik yang tidak terdokumentasi maupun mereka yang berangkat melalui jalur resmi (legal).

Berikut ini salah satu contoh mengenai hal tersebut. Hasil wawancara penulis dengan tenaga kerja perempuan yang bekerja di Malaysia dan Singapura dalam perjalanan pulang dari daerah tujuan menunjukkan hal berikut. Rata-rata tenaga kerja perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga harus mengembalikan "utang" mereka kepada penyalur tenaga kerja dengan cara potong gaji selama kurang lebih 8 bulan. Akibatnya, mereka harus hidup hanya dengan 10 dolar Singapura selama 8 bulan pertama penempatan. Ketika pulang pertama kali, mereka bahkan tidak membawa uang untuk keluarganya.<sup>9</sup> Contoh tersebut hanya gambaran risiko yang termasuk ringan yang dihadapi oleh migran perempuan. Kasus lain yang memperlihatkan nasib buruk dan lebih tragis migran perempuan banyak dijumpai.<sup>10</sup>

Jika dilihat dari persoalan yang dihadapi oleh migran perempuan, muncul pertanyaan menarik untuk didiskusikan: mengapa dalam kondisi ketika telah banyak migran yang

mengalami nasib tragis justru makin banyak perempuan menempuh risiko menjadi pekerja di luar negeri? Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab sebab sejauh ini usaha untuk menjawab pertanyaan tersebut masih meletakkan migran sebagai objek.

### **Faktor yang Memengaruhi Migrasi Internasional**

Terdapat tiga kelompok teori untuk menjelaskan fenomena migrasi internasional. *Pertama*, pendekatan individu berargumentasi setiap migran merupakan makhluk rasional yang memiliki penilaian terhadap daerah tujuan untuk memilih kombinasi yang optimum dari tingkat upah, keamanan pekerjaan, dan biaya perjalanan. Pendekatan ini disebut juga pendekatan modal manusia atau *human capital*, yang melihat seseorang sebagai produk dari investasi, di dalam pendidikannya misalnya, atau keterampilannya, atau kesehatannya, dan mencari tempat terbaik untuk memanfaatkannya. Seseorang dianggap selalu mencari kesempatan untuk *maximize utilities* dan bermigrasi merupakan salah satu caranya.

Pendekatan ini kemudian dikembangkan ke dalam pendekatan keluarga yang memandang migrasi bukan semata-mata keputusan individu, tetapi merupakan keputusan keluarga. Hal ini dilakukan dalam rangka memperluas

---

<sup>9</sup> Wee dan Sim (2004) menemukan kasus lain yang memperlihatkan migran perempuan menjadi korban yang ironisnya justru difasilitasi oleh "aturan" yang ada. Mereka menyebutkan seorang migran harus membayar kurang lebih US\$384,67 – US\$1.666,89 kepada agen penyedia tenaga kerja yang telah diakui oleh Konsulat Indonesia dibandingkan dengan aturan formal yang berlaku di Hongkong, yaitu US\$47,06 untuk memperbarui kontrak.

<sup>10</sup> Cerita lain tentang nasib buruk pekerja perempuan di luar negeri dapat dibaca dari hasil penelitian Catarina Purwana Williams sebagaimana dikutip oleh Wee dan Sim (2004: 177-178).



dan membagi risiko yang harus ditanggung. Dengan keputusan diambil secara kolektif dalam keluarga, maka keluarga secara kolektif juga menanggung risiko dan memperoleh keuntungan dari migrasi.

Pendekatan *kedua* yang dapat digunakan untuk menjelaskan migrasi adalah pendekatan struktural. Salah satu penjelasan yang paling sering digunakan berkaitan dengan munculnya *dual labour market* sebagai akibat penerapan kapitalisme. Di satu pihak terdapat pekerjaan yang memberikan keamanan dan upah yang tinggi, di pihak lain muncul pekerjaan yang sifatnya sementara, pendapatan rendah, dan pada umumnya berkaitan dengan pekerjaan “tidak nyaman” (3Ds: *dirty, dangerous* dan *difficult*) dan tidak diinginkan oleh pekerja. Pekerjaan jenis kedua tersebut biasanya kemudian diisi oleh migran, khususnya migran perempuan. Mengapa? Karena mereka dipandang sebagai kelompok pekerja yang mudah dikontrol dan dalam posisi membutuhkan pekerjaan. Akibatnya, migran termarginalkan dalam struktur ekonomi yang ada.

Hal ini terkait dengan masalah struktural lainnya, yaitu pengangguran. Angkatan kerja di negara sedang berkembang tidak dapat “menganggur” karena absennya tunjangan penganggur sehingga mereka “harus” bekerja, apapun jenis pekerjaannya. Migrasi sebagai bagian dari strategi bertahan hidup akan dilakukan oleh perempuan dari keluarga miskin ketika kepala keluarga tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini memaksa perempuan ikut berfungsi sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

Hal penting yang perlu dicatat adalah keputusan bermigrasi tidak semata-mata merupakan keputusan individu atau muncul akibat faktor-faktor struktural tersebut. Ada faktor lain, yaitu jaringan migran (*migrant network*), yang juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan seseorang untuk bermigrasi. Lebih dari itu, muncul pendekatan sistem yang memandang aliran barang serta kapital yang dikombinasikan dengan pengaruh politik dan kultural merupakan faktor yang memengaruhi migrasi.

Jika teori-teori tersebut digunakan untuk menjelaskan mengapa perempuan melakukan migrasi ke luar negeri menempuh risiko yang begitu besar, muncul beberapa kesimpulan yang cukup menarik. *Pertama*, jika keterlibatan perempuan dalam migrasi internasional dipandang sebagai usaha untuk memaksimalkan *utilities*, dorongan untuk melakukan migrasi dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi individu, ekspos gaya hidup yang “kapitalis” membuat banyak perempuan terdorong untuk mencari pendapatan yang lebih baik di negeri orang untuk memenuhi selera gaya hidup tersebut. Dari sisi yang lain, meningkatkan status sosial juga dapat berfungsi sebagai alasan mengapa perempuan bekerja di luar negeri. Hal ini khususnya berlaku untuk migran perempuan muda yang belum menikah. Dalam konteks ini, cara memosisikan diri perempuan muda dalam lingkungan sosial ekonomi tertentu menjadi faktor penting. Migrasi merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan dan dengan pendapatan tersebut, migran akan mampu memosisikan dirinya dalam status yang lebih tinggi di dalam masyarakat.

Akan tetapi, dapat pula dorongan tersebut berasal dari keterpaksaan akibat dari ketidakmampuan kepala keluarga berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Ketika secara ekonomi kepala keluarga tidak mampu memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, strategi yang dijalankan adalah memasukkan istri sebagai pencari nafkah. Jika hal ini juga masih belum mampu mengangkat perekonomian keluarga, maka anak, laki-laki maupun perempuan, menjadi pencari nafkah yang lain. Mekanisme ini dikenal dalam teori strategi bertahan hidup yang menjelaskan migrasi merupakan salah satu strategi di antara strategi-strategi yang lain.

Penjelasan kedua ini secara tidak langsung menunjuk kemiskinan sebagai sumber atau faktor yang menyebabkan migrasi perempuan ke luar negeri. Di samping itu, penjelasan tersebut sekaligus menggambarkan keputusan bermigrasi dalam skala tertentu bukan merupakan keputusan individu, yaitu si migran sendiri, tetapi telah menjadi keputusan kolektif keluarga. Perempuan dalam hal ini jika dalam bermigrasi bukan atas kehendak sendiri, maka ia dalam posisi dipaksa atau terpaksa menanggung risiko yang seharusnya ditanggung oleh kepala keluarga.

Keharusan perempuan untuk bermigrasi ke luar negeri juga disebabkan oleh ketidaktersediaan kesempatan kerja bagi mereka di daerah asal atau ketidakmampuan perempuan untuk berkompetisi di pasar kerja dalam negeri. Mereka kemudian harus masuk

ke dalam pekerjaan yang tidak diinginkan lagi di daerah tujuan dengan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jika bekerja pada pekerjaan yang sama di dalam negeri, misalnya pembantu rumah tangga. Menurut Wee dan Sim (2005: 168), para pembantu rumah tangga tersebut tidak hanya melakukan pekerjaan rumah tangga (*housework*), tetapi juga merawat anak, merawat lansia, dan merawat anggota keluarga yang cacat pada keluarga-keluarga di negara tujuan. Jika sinyalemen ini benar, apa yang terjadi sebenarnya adalah bentuk lain dari eksploitasi terhadap tenaga kerja perempuan di luar negeri.

Akar dari permasalahan ini tidak dapat hanya diletakkan pada kondisi internal dalam negeri. Namun lebih dari itu, sistem perekonomian dunia yang tidak adil telah ikut menyebabkan ketidakadilan terhadap pekerja migran perempuan. Hal ini bukan berarti melemparkan permasalahan kepada faktor yang berada di luar kontrol kita, tetapi tetap harus disadari situasi global juga mengambil peran dalam hal ini.

Menurut Asis (2003), fenomena migrasi perempuan merefleksikan bagaimana globalisasi<sup>11</sup> telah memengaruhi dan mengatur kembali (*reordered*) kehidupan keluarga. Keterlibatan migran perempuan pada pekerjaan domestik (pembantu rumah tangga atau perawat anak) telah memungkinkan majikan perempuan memiliki kesempatan untuk bekerja di luar rumah (sektor publik). Dalam konteks ini, dapat dikatakan perempuan

---

<sup>11</sup> Asis (2003) mengutip Rachel Parrenas yang mengatakan migran perempuan telah menjadi *servants of globalization*.

dikorbankan untuk kepentingan perempuan lain.

Persoalan menjadi sangat serius jika kemudian proses migrasi perempuan bukan lagi migrasi “biasa”, tetapi berubah menjadi trafficking. Menurut Darwin, dkk. (2005), sering kali migrasi internasional berkaitan dengan perdagangan manusia (perempuan). Dalam hal ini tempat tujuan, pekerjaan, gaji dan perlakuan majikan berada di luar kontrol migran sehingga mereka menjadi objek. Menurut French (dalam Wee dan Sim, 2004: 180), hal ini mengakibatkan mobilitas sosial mereka menjadi terbatas. Dalam situasi seperti inilah kemudian banyak masalah muncul. Karena semuanya di luar kontrol migran, setiap masalah yang muncul tidak mempunyai penyelesaian yang selalu berpihak kepada migran perempuan. Permasalahan akan lebih serius lagi jika kemudian migran perempuan dipekerjakan sebagai pekerja seks dan gejala seperti ini tampaknya semakin meningkat.

Di luar isu-isu tersebut, terdapat dua isu penting yang sangat jarang memperoleh perhatian peneliti di Indonesia. *Pertama*, ketika migran perempuan bekerja di sektor domestik, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hal ini merupakan respons terhadap kebutuhan tenaga kerja domestik di negara tujuan. Kebutuhan tersebut muncul karena pekerjaan domestik di daerah tujuan yang pada awalnya dikerjakan oleh perempuan menjadi kosong karena perempuan di negara tujuan bekerja di sektor publik dan laki-laki tidak mampu menggantikan peran tersebut. Artinya, keinginan perempuan untuk bekerja di sektor publik telah menyebabkan masuknya

perempuan lain menggantikan peran perempuan tersebut. Sudah bukan rahasia umum lagi, selama ini pelecehan terhadap pekerja perempuan sebagian besar terjadi di sektor domestik. Jika logika ini benar, apakah masuknya perempuan ke sektor domestik tersebut bisa menjadi gambaran tentang “pengorbanan” perempuan untuk perempuan lain?

*Kedua*, isu tentang *children left behind* sangat jarang diperhatikan. Ketika salah satu orang tua menjadi migran, khususnya jika ibu yang menjadi migran, akan terjadi persoalan dalam pengasuhan anak. Pertanyaan yang cukup mendasar adalah siapa yang menggantikan peran orang tua? Tidak tertutup kemungkinan jika orang tua pergi, pengaruhnya terhadap perkembangan anak akan cukup besar. Ketika ayah pergi, anak akan kehilangan tokoh “panutan” dalam keluarga dan ketika ibu pergi, anak akan kehilangan tokoh sentral dalam pengasuhan anak. Jika keduanya pergi, anak akan kehilangan panutan dan juga tokoh sentral tersebut. Dari sisi ekonomi, barangkali remitan dari migran dapat mencukupi kebutuhan anak. Akan tetapi, kebutuhan yang bersifat psikososial sangat sulit tergantikan meskipun ada anggota keluarga lain yang secara fisik dapat menggantikan orang tua untuk mengasuh anak. Pertanyaan yang juga penting untuk dijawab adalah apakah dampak migrasi internasional terhadap kesehatan mental anak?

Dari sisi kepentingan akademik maupun praktis, dua pertanyaan tersebut penting untuk direspons. Tujuannya satu, agar diperoleh

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena migrasi internasional tenaga kerja Indonesia.

## Penutup

Adalah suatu keanehan bahwa masih ada pandangan mengirim pekerja migran perempuan ke luar negeri identik dengan ekspor komoditas ekonomi. Di samping itu, juga aneh jika pembicaraan pengiriman tenaga kerja perempuan ke luar negeri selalu dikaitkan dengan perolehan devisa. Secara normatif memang benar devisa yang bersumber dari *remittances* memiliki peran penting dalam perekonomian nasional maupun lokal dan juga ekonomi keluarga. Hal ini tampak jelas dari beberapa studi (Sukamdi, dkk., 2004) mengenai dampak *remittances* terhadap makro ekonomi. Akan tetapi, jika hal ini dijadikan orientasi kebijakan pengiriman pekerja perempuan ke luar negeri, maka banyak masalah akan muncul menyangkut perlindungan, hak asasi, dll. Untuk itu, penting untuk memahami pekerja migran sebagai *human being* yang memerlukan perlakuan sebagai manusia. Migran tidak lagi hanya dipahami sebagai jumlah kuantitasnya, tetapi juga tiap-tiap individu sebagai subjek dalam dinamika sosial ekonomi nasional maupun lokal.

Migrasi seharusnya juga harus dipahami sebagai perilaku yang di dalamnya terkait erat dengan konteks sosial, budaya, dan psikologis. Hal ini menuntut pembenahan yang cukup fundamental dalam hal sistem penempatan, pelayanan, dan perlindungan. Mudah-mudahan permintaan Presiden SBY ketika

meresmikan terminal keberangkatan khusus TKI (*Jawa Pos*, 2006) untuk membenahi sistem penempatan, perlindungan, dan pelayanan akan segera menjadi kenyataan.

Di samping itu, dibutuhkan reorientasi penelitian di bidang migrasi internasional untuk mengarahkan penelitian migrasi internasional di luar topik umum mengenai faktor pendorong, penarik, remitan, dan sejenisnya. Penelitian yang lebih menekankan pada dampak sosial psikologis, baik bagi migran sendiri maupun keluarga, merupakan pilihan topik yang akan melengkapi hasil penelitian migrasi yang telah banyak dilakukan selama ini.

## Daftar pustaka

- Abdullah, Irwan. 2002. "Studi Mobilitas Penduduk: Antara Masa Lalu dan Masa Depan" dalam Tukiran, dkk. (eds) *Mobilitas Penduduk: Tinjauan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, hlm. 9-22.
- Ananta, Aris. 2000. "Economic Integration and Free Labour Area: an Indonesia Perspective" dalam Sukamdi, dkk. (eds). *Labour Migration in Indonesia: Policies and Practices*. Yogyakarta: Population Studies Center, Gadjah Mada University, pp. 23 – 62.
- Asis, Maruja B. 2003. "Asian Women Migrants: Going the Distance but Not Far Enough". <http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=103>.
- Jawa Pos*. 2006. "Barang TKI Nyanthol Hingga 5 Tahun, Presiden Kaget Saat Resmikan Terminal Keberangkatan di Bandara Sukarno-Hatta", Rabu, 30 Agustus, hlm.16.

- Darwin, Muhadjir dkk. 2005. "Perdagangan dan Seksualitas dalam Migrasi Lintas Batas Indonesia Malaysia" dalam Muhadjir Darwin, dkk. (eds). *Bagai Telur di Ujung Tanduk, Mobilitas Lintas Batas dan Eksploitasi Seksual di Kawasan Asia Tenggara dan Sekitarnya*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, hlm. 239-290.
- Dwiyanto, Agus. 2001. "International Migration and Its Impact on Regional Development Affairs: A Case Study of Indonesia". Paper presented in Annual Meeting of APMRN, Manila.
- Faturochman. 2002. "Nasib Migran dan Dominasi Konsep-konsep Migrasi Internasional", dalam Tukiran, dkk. (eds) *Mobilitas Penduduk, Tinjauan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, hlm. 23-34.
- Hugo, G.J. 1995, "International labour migration and the family: Some observations from Indonesia", *Asian and Pacific Migration Journal*, 4( 2-3): pp. 273-301.
- Hugo, Graeme J. 2004. "International Migration in Southeast Asia Since World War II". in Aris Ananta and Evi Nurvidya Anwar (eds). *International Migration in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS, pp. 28-70.
- Kassim, Azizah. 1997. "Illegal Alien Labour in Malaysia: Its Influx, Utilization and Reunifications". *Indonesia and the Malay World*, (71): 50-82.
- Keban, Yeremias T. 2000. "International Migration: The Strategy for National Development and Globalization" dalam Sukamdi dkk. (eds). *Labour Migration in Indonesia: Policies and Practices*. Yogyakarta: Population Studies Center, Gadjah Mada University, pp. 221-240.
- Mantra, Ida Bagus; Kasto dan Yeremias T. Keban. 1999. *Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia: Studi Kasus Flores Timur, Lombok Tengah, dan Pulau Bawean*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Marrie Wattie, Anna. 2002. "Bukan Sekadar Uang: Pendekatan Deprivasi Relatif dalam Migrasi" dalam Tukiran dkk. (eds.) *Mobilitas Penduduk, Tinjauan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, hlm. 35-56.
- Nasution, Arif M. 2000. "International Migration in Southeast Asia: A Case Study of Indonesian Workers in The Malaysian Peninsula" in Sukamdi, et al. (eds.), *Labour Migration in Indonesia: Policies and Practices*. Yogyakarta: Population Studies Center, Gadjah Mada University, pp. 185–220.
- Setiadi. 2004. "Migrasi perempuan: Respons Lokal dan Alternatif Kebijakan". dalam Faturochman, dkk. (eds) *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, hlm. 121-138.
- Sukamdi, Elan Satriawan, and Abdul Haris. 2004. "Impact of Remittances on the Indonesia Economy". in Aris Ananta and Evi Nurvidya Anwar (eds) *International Migration in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS, pp. 137-165.

- Tjiptoherijanto, Prijono. 2000. "International Migration: Process, System, and Policy Issues" in Sukamdi, et al. (eds). *Labour Migration in Indonesia: Policies and Practices*. Yogyakarta: Population Studies Center, Gadjah Mada University, pp. 63 – 89.
- Vermonte, Phillips, J. 2002. "RI must learn from illegal migrant issue". *The Jakarta Post*, August.
- Wee, Vivienne and Amy Sim. 2004. "Transnational Networks in Female Labour Migration". in Aris Ananta and Evi Nurvidya Anwar (eds), *International Migration in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS, pp.166-198.